BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (*geist*) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan modern serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI

Sistem peradilan yang kokoh yang dibangun secara serasi baik vertikal maupun horizontal akan memberikan jaminan dalam mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, disamping tercapainya keadilan.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala

dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;

Bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;

e-Court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

e-Court diharapkan mampu meningkatkan efektifitas administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dimana masyarakat pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya dalam proses berperkara di Pengadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bisa terwujud.

Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem *e-Court* di Indonesia jauh tertinggal dari Negara-negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti negara Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *SingPass* ID bagi individu atau *CorpPass* ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.

Keuntungan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-*

Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersaris secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan efektifitas administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dimana masyarakat pencari keadilan dalam proses berperkara di Pengadilan dengan mengacu pada Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan bisa terwujud.

Saran-saran yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi, bimbingan teknis pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia terhadap modernisasi, perkembangan sains dan teknologi sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal perkara secara online yang berprinsip pada peradilan yang cepat, sederhana dan ringan terwujud.

Dalam rangka melaksanakan dan menunjang pelaksanaan *e-court* diharapkan dapat bekerja sama antara para advokat, masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum sendiri sehingga terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.